

Genealogi Kewirausahaan Sosial

Rizqyansyah Fitramadhana¹

¹Program Studi Sosiologi_Fisipol_ Universitas Gadjah Mada
fitramadhanarizqyansyah@gmail.com

ABSTRAK

Kewirausahaan sosial sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Pemerintah, lembaga non-profit, dan universitas terus mempromosikan kehebatan kewirausahaan sosial. Mereka mengklaim bahwa kewirausahaan sosial akan menghasilkan kemaslahatan. Sayangnya, meskipun banyak penelitian menunjukkan dampak baik kewirausahaan sosial, kajian historis dan kritis tentangnya jarang sekali dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan itu dan menunjukkan konteks serta kepentingan kewirausahaan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode genealogi digunakan sebagai ujung tanduk penelitian dengan fokus pada studi pustaka. Setelah melakukan pembacaan kritis terhadap historiografi kewirausahaan sosial studi ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, palingan sosial terjadi di tahun 1980. Ini mengizinkan lahirnya kewirausahaan sosial. Neoliberalisme dan penekanannya kepada pemotongan peran negara merupakan konteks kemunculan kewirausahaan sosial. Secara sederhana, keputusan pemerintah untuk memangkas bantuan sosial serta permasalahan sosial yang mengikutinya adalah alasan utama timbulnya ide kewirausahaan sosial. Kedua, kewirausahaan sosial lahir dari rahim kewirausahaan tradisional. Keduanya sama-sama mendayagunakan subjek kewirausahaan. Ketiga, institusionalisasi kewirausahaan sosial dipengaruhi oleh kepentingan pasar bebas dan individualisasi neoliberal. Keempat, organisasi internasional berperan penting dalam penyebaran kewirausahaan sosial di seluruh dunia, khususnya negara berkembang.

Kata kunci: Genealogi, Kewirausahaan Sosial, Neoliberalisme

ABSTRACT

In Indonesia, social entrepreneurship has become the new buzzword. Government, non-profit organizations, and university continuously promoting the positives side of social entrepreneurship. It has been claimed that social entrepreneurship always yields prosperity. Unfortunately, although a number of publications has shown decent effects of social entrepreneurship, there was and is small attention to critical and historical reading of it. This study attempts to fill that gap and discloses the context and interest of social entrepreneurship. Genealogy method which depends on literature study will be used to attain the goals of this research. After doing critical reading of social entrepreneurship genealogy, the study has four conclusions to offer. First, social turn had been happening in the 1980 allowing the emergence of social entrepreneurship. Neoliberalism with its emphasis on minimal state was the exact context of the advent of social entrepreneurship. To simplify, government decision to retreat social benefits and social problems ensuing from it were important factors in supporting social entrepreneurship ascendancy. Second, social entrepreneurship was born out of traditional entrepreneurship. Both of them galvanize entrepreneur subject. Third, the institutionalization of social entrepreneurship was heavily influenced by neoliberal spirit of free market and individualization. Four, international organizations have been crucial to social entrepreneurship expansion across developing countries.

Keywords: Genealogy, Social Entrepreneurship, Neoliberalism .

PENDAHULUAN

Indonesia sedang dilanda wabah. Sebuah wabah bernama kewirausahaan sosial. Pemerintah, lembaga non-profit, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, hampir semua entitas terjangkiti virus kewirausahaan sosial. Baru-baru ini, pemerintah, melalui Kementerian Sosial, merilis Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) sebagai bagian integral usaha pengentasan kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH). Di tempat lain, lembaga non-profit seperti Ashoka Foundation, British Council, DBS Foundation terus menyebarkan gospel kewirausahaan sosial lewat berbagai macam program kreatif. Berdiri secara mandiri dan dengan semangat kolaboratif, deretan lembaga non-profit tersebut berhasil membangun ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia. Pencapaian mayor itu kemudian coba diemulasi oleh universitas. Didorong oleh tuntutan relevansi kampus, perguruan tinggi belakangan ramai-ramai memperkenalkan program inkubasi, kompetisi, bahkan membuka program studi khusus kewirausahaan sosial. UI, UGM, Universitas Trisakti, untuk menyebut beberapa, adalah beberapa nama besar yang sudah ikut bermain dalam gelanggang kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial perlahan juga merambah lahan kajian. Meskipun masih kalah jauh dibandingkan akselerasi praktik, beberapa studi yang khusus meneliti tentang geliat kewirausahaan mulai menampakkan diri. Hempri Suyatna dan Yanti Nurhasanah (2017), misalnya, menulis artikel berjudul *Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda*; di situ mereka mendedah bagaimana anak muda mulai melirik kewirausahaan sosial sebagai prospek pekerjaan yang menjanjikan sekaligus berbobot sosial. Di lokus terpisah, Hardi Utomo (2014) menjelaskan cara menumbuhkan minat kewirausahaan sosial. Rintan Saragih dan Duma Megaria Elisabeth (2020) mencoba mengeksplikasi strategi bertahan kewirausahaan sosial di tengah pandemi Covid-19. Dewi Cahyani Puspitasari (2018) menyunting bunga rampai bertitel *Kewirausahaan Sosial: Tinjauan Konsep dan Terapan Dalam Organisasi Sosial Islam* yang menguraikan praktik kewirausahaan sosial di lingkungan. Semua kajian itu sukses mendokumentasikan perkembangan inkremental kewirausahaan sosial. Sayangnya, sebagian besar penelitian yang baru saja disebutkan tadi masih berkutat pada pembahasan mengenai dekskripsi praktik terbaik dan evaluasi performa kewirausahaan sosial. Hampir tidak ada yang terpenggil untuk mendekati kewirausahaan sosial dari sudut pandang kritis atau historis.

Dari sekian banyak kajian kewirausahaan sosial, hanya ada beberapa yang mencoba menggamit dimensi kritis dan historis di dalam studi mereka. Dua contoh utama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tadzki Nursafira dan Rizky Alif Alvian (2018) serta Aida Idris dan Sri Rahayu Hijrah Hati (2013). Menggunakan perspektif Polanyian, Tadzki dan Rizky beargumen bahwa timbulnya kewirausahaan sosial di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari strategi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo, khususnya lewat penciptaan wirausaha lokal. Beranjak ke dalam jengjala sejarah, Aida serta Sri Rahayu meyakini kewirausahaan sosial telah tumbuh subur di

Indonesia bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Mereka mencatat aktivitas sosial deretan organisasi sosial seperti Sekolah Kartini, Sarekat Dagang Islam, dan Taman Siswa sebagai proposisi pendukung. Namun, meskipun berhasil menggambarkan keberadaan kewirausahaan sosial jauh sebelum konsep itu menjadi *buzzword*, studi historis Aida dan Sri Rahayu masih mengalami defisiensi. Kekurangan itu secara khusus bersarang pada absennya penuturan sejarah formal dan universal kewirausahaan sosial. Tidak adanya eksplanasi yang memuaskan mengenai sejarah kewirausahaan sosial membuat studi tentangnya terkesan *creatio ex nihilo*. Kewirausahaan sosial seolah datang secara tiba-tiba tanpa ada denominator. Akibatnya, ketika lembaran konteks dihilangkan, kewirausahaan sosial terlihat layaknya seonggok konsep yang netral tanpa menyimpan sekeping kepentingan apa pun.

Berlawanan dengan proklivitas *creatio ex nihilo* studi kewirausahaan sosial selama ini, penelitian ini berniat melakukan penelanjangan komprehensif terhadap kewirausahaan sosial. Untuk memuluskan ikhwal tersebut, dua pertanyaan penelitian akan diajukan sebagai penerang jalan: (a) bagaimana sejarah kemunculan kewirausahaan sosial? dan (b) seperti apa konteks wacana dan praktik sosial kewirausahaan sosial?.

METODE PENELITIAN

Model pembacaan genealogi akan dipakai di dalam penelitian ini untuk membongkar tubuh kewirausahaan sosial. Genealogi merupakan metode sejarah yang digunakan oleh Michel Foucault untuk melihat secara kritis fenomena kontemporer dari pertarungan, konflik, aliansi nun terjadi di masa lalu. Ide dasar dari genealogi, menurut Foucault, adalah pencarian proses *descent* dan *emergence* (Michel Foucault, 1984). Maksudnya, genealogi ingin memproblematisasi keadaan sekarang melalui pengungkapan relasi kekuasaan yang membawa kondisi itu (Mitchell Dean, 1994). Genealogi dimulai, pertama-tama, dengan mengidentifikasi praktik kekinian yang sering dicerna secara esensial lalu berusaha mencari pertarungan kekuasaan yang memproduksinya (David Garland, 2014).

Di dalam penelitian ini, pendayagunaan genealogi dimulai dengan cara mempermasalahkan sebuah fenomena kontemporer. Kewirausahaan sosial merupakan realitas kekinian yang menjadi fokus studi ini. Deskripsi tentangnya, dengan demikian, bakal diperkenalkan terlebih dahulu di bagian awal bersama tren perkembangannya. Setelah menerangkan kewirausahaan sosial, penulis lalu langsung menguliti bentuk asli kewirausahaan sosial dengan cara menilik kembali proses perancangannya. Di sini, perlahan tapi pasti, akan terlihat bagaimana fenomena kewirausahaan sosial sebenarnya dikonstitusikan oleh adanya strategi kekuasaan. Bersandar kepada genealogi, studi ini menggunakan sumber sekunder secara penuh. Artikel, buku, jurnal; semua sumber bacaan yang memungkinkan penelusuran genealogis akan digunakan. Untuk urusan teknik pengumpulan data, penelitian memberdayakan studi pustaka sebagai ujung tombak.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Kewirausahaan

Perbincangan akademis mengenai kewirausahaan dimulai sejak abad delapan belas. Waktu itu, seorang pemikir Perancis bernama Jean-Baptis Say membubuhkan definisi baku tentang kewirausahaan untuk pertama kalinya. Kewirausahaan, menurutnya, bisa disejajarkan dengan penciptaan nilai; secara eksplisit dia berkata: “wirausaha mengubah sumber daya ekonomi dari yang awalnya masih bernilai rendah menjadi sumber daya bernilai tinggi dengan produktifitas serta produksi besar” (Say, 2015). Beralih ke rentang waktu selanjutnya, ekonom Joseph Schumpeter menambahkan atribut inovasi ke dalam kantung konsep kewirausahaan. Dalam benak Schumpeter, aktivitas kewirausahaan tak mungkin melaju kencang tanpa adanya inovasi yang berperan sebagai penghancur kreatif. Di tempat lain, Peter Drucker, mahaguru ilmu manajemen, melihat kewirausahaan dari sudut pandang kesempatan. Baginya, wirausaha mesti cermat mengeksploitasi kesempatan apabila usahanya mau merekah.

Meskipun memberikan signifikansi pengertian yang berbeda, deretan ahli di atas bersekapat pada satu hal: kewirausahaan memerlukan subjek yang mempunyai perangkat sifat spesifik. Sebagai subjek, seorang wirausaha mesti memiliki perangkat khusus seperti kreatif, inovatif, peka terhadap kesempatan, dan berani mengambil risiko. Semua virtu tersebut diberdayakan untuk mencapai satu tujuan, yaitu meraih sebanyak mungkin keuntungan. Wirausaha menyabung hidup berkompetisi satu sama lain menggunakan modalitas dasar tersebut. Tanpa adanya kepemilikan atas varian model itu, pelaku usaha tentu akan kesulitan bertempur di medan pertempuran.

Kewirausahaan Sosial

Bagi banyak insan, kewirausahaan adalah bentala pencarian profit tiada akhir. Hal itu berlaku setidaknya sampai tahun 1980 ketika Ashoka Foundation resmi mengudara. Saat itu William Drayton menawarkan proposal baru yang terbilang ekstrem: menggunakan *modus vivendi* kewirausahaan untuk mencapai tujuan sosial. Dia menamakan ide anyarnya ini kewirausahaan sosial; sebuah upaya terstruktur menyelesaikan masalah sosial dengan skema kewirausahaan konvensional. Puspas antara kategori kewirausahaan dan sosial dilatarbelakangi oleh dua alasan ultima, (a) politik pengendalian anggaran yang membuat dana kebijakan sosial turun drastis dan (b) semakin banyaknya problematika sosial yang muncul akibat berkuasanya rezim neoliberal. Inisiatif Drayton pada taraf selanjutnya disambut hangat oleh berbagai pihak. Tak lama setelah Ashoka Foundation berdiri, kepak sayap kewirausahaan sosial pun meluas. Ia bercokol di berbagai tempat, termasuk di Indonesia.

Intervensi teoretis perihal kewirausahaan sosial meningkat bersamaan dengan meledaknya praktik tentangnya. Dalam tahap awal, penelusuran akademis terkonsentrasi pada perbedaan konseptual antara kewirausahaan konvensional dan sosial. Gregory Dees (1998), misalnya, mendekati distingsi

keduanya dari segi misi sosial. Kewirausahaan sosial fokus mengejar tujuan sosial sedang kewirausahaan tradisional berambisi mencetak kepingan keuntungan. Penilaian serupa juga bisa kita temukan dalam tulisan David Bornstein. Menurut Bornstein (2010), kewirausahaan konvensional hanya menginginkan profit sedangkan kewirausahaan sosial mencoba mengombinasikan profit dan target sosial. Deskripsi paling komplis berkenaan dengan distingsi kewirausahaan biasa dan sosial ditulis oleh James Austin, Howard Stevenson, dan Jane Wei-Skilern. Mereka bertiga menyimpulkan bahwa episentrum perbedaan terletak pada tiga hal: (a) tujuan—kewirausahaan bergerak berdasarkan maksim pencarian keuntungan sedangkan kewirausahaan sosial mendayagunakan impetus sosial, (b) pengukuran kesuksesan—kewirausahaan menggunakan performa finansial untuk mengukur kesuksesan, kewirausahaan sosial menakar pencapaian dari dampak sosial yang ditimbulkan, (c) kewirausahaan memobilisasi sumber daya demi kepentingan diri, kewirausahaan sosial mengonsumsi sumber daya atas nama eskalasi efek sosial (Austin, Stevenson, & Wei-Skilern, 2006).

PEMBAHASAN

Mencari Keuntungan: Kewirausahaan Dari Era Mesopotamia hingga Modern

Membicarakan kewirausahaan sosial tanpa terlebih dahulu menyentuh topik kewirausahaan merupakan dosa besar. Hal itu terjadi karena kewirausahaan sosial adalah warisan langsung dari kewirausahaan. Keduanya mempunyai hubungan erat, bahkan boleh dibilang bersifat *sine qua non* (tidak terpisahkan). Oleh karena itu, agar mendapatkan pancaran citra yang kentara dari kewirausahaan sosial, perlu rasanya memulai penelusuran historis kewirausahaan sosial dari geliat perkembangan konsep kewirausahaan.

Sejarawan masih berdebat soal sejarah kewirausahaan sosial hingga saat ini. Satu hal yang membuat garis demarkasi itu terasa begitu jauh adalah perbedaan konsepsi tentang apa itu kewirausahaan. Oleh karena itu, guna menghindari pertempuran tiada akhir menyangkut masalah definisi operasional tersebut, akan sangat bijaksana apabila sebelum memulai petualangan genealogis, pengertian kewirausahaan ditampakkan dengan jelas. Mengambil pengertian yang berlaku secara umum, penelitian ini mengartikan kewirausahaan sebagai sebuah upaya untuk menambah nilai lebih melalui pelibatan disposisi kreatif, inovatif, dan penangkapan peluang.

Setelah membubuhkan definisi terhadapnya, perjalanan historis kewirausahaan dimulai dari masa Mesopotamia. Dalam rentang ini seorang wirausaha disebut sebagai *merchant-entrepreneur*. Praktik kewirausahaan dilakukan utamanya dengan cara melakukan perdagangan jarak jauh. Dalam untaian kata Sameul Kramer (1978): “perdagangan jauh merupakan hal esensial di kehidupan kota-kota di Mesopotamia.” Biasanya para *merchant-entrepreneur* akan melakukan perjalanan akasa yang disokong oleh penanam modal. Orang yang mendukung aktivitas *merchant entrepreneur* ini adalah *tamkarun*. Ketika menyerahkan kapital kepada penjelajah, *tamkarun* hampir pasti mengangkat *shamallu*. Tugas

utama dari *shamallu* adalah mengawasi gerak-gerik penjelajah untuk memastikan bahwa *merchant-entrepreneur* melakukan tugasnya dengan benar. Sistem kerja sistematis seperti inilah yang membuat altar ekonomi Mesopotamia tumbuh cepat. Hal ini ditegaskan oleh Jacquetta Hawks (1973) yang mengatakan bahwa kekuatan ekonomi Mesopotamia sangat bergantung pada eksistensi institusi kredit, selain tentunya karena suburnya tanah dan melimpahnya air. Semua usaha ini, menurut Joe Carlen (2016), bertujuan untuk menambah kekayaan. Profit, dengan demikian, merupakan patos ultima kosmos kewirausahaan Mesopotamia.

Setelah kemunduran Mesopotamia, Phoenician muncul sebagai prominem kewirausahaan selanjutnya. Berbeda dari pendahulunya, Phoenician mengandalkan eksplorasi maritim daripada perjalanan darat. Namun, tidak seperti bangsa Mesir, Yunani, dan Roman yang menggunakan kekuatan maritim dalam rangka penaklukan, Phoenician melihat eksplorasi maritim dari sudut pandang komersial. Hal lain seperti keindahan artistik dan pelebaran kekuatan militer hanyalah kebutuhan sekunder (Carlen, 2016). Akan tetapi, meskipun menomorduakan penjajahan, bangsa Phoenician akan melakukan jalan pedang jika memang terpaksa. Meskipun begitu, ketika melakukan peperangan, pedagang Phoenician sama sekali tidak memperhitungkan luas tanah melainkan keuntungan (Carlen, 2016). Jadi, walaupun harus memperebutkan wilayah, latar belakang pencaplokan itu berlandaskan profit bukan perluasan wilayah. Niat ini ikut meminimalisir korban jiwa apabila pergulatan diperlukan. Selain kedigdayaan di lanskap laut, tumbuh kembang ekonomi Phoenician juga dipengaruhi oleh fakta bahwa struktur sosial-politik mereka didominasi oleh wirausaha. Bahkan, menurut observasi Aldo Massa (1977), banyak pemimpin di kota-kota Phoenician berasal dari konglomerat bisnis. Realitas ini jelas mempengaruhi kemajuan tatanan kehidupan masyarakat Phoenician.

Kejayaan komersial Phoenician runtuh seketika kala penguasa Asia Barat, Raja Assyria Assurnasirpal II, melakukan rentetan ekspansi ke wilayah mereka. Sadar akan perbedaan kekuatan yang cukup besar, bangsa Phoenician memutuskan menyambut kedatangan pasukan Assyria dengan hangat. Penerimaan ini merupakan siasat pemimpin Phoenician supaya tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi meskipun secara politik harus tunduk dan tidak berdaulat. Penyerahan diri kepada Raja Assurnasirpal II membuat bangunan ekonomi Phoenician mengalami regresifitas. Perlahan, agregat keuntungan mereka semakin menipis. Sayangnya, di tengah keroposnya ekonomi Phoenician tidak ada lagi peradaban yang meneruskannya.

Episode gemilang kewirausahaan terhenti saat bangsa Roma berkuasa. Lingkungan Roma sama sekali tidak memberikan insentif kepada segala macam model kewirausahaan (Gibbon, 1995). Virtu kewirausahaan berseberangan dengan moralitas yang dipegang oleh masyarakat Roma. Mati di tangan *milieux* Roma, kewirausahaan kemudian dibangun kembali oleh masyarakat Arab.

Berlawanan dengan keengganan warga Roma, “peradaban Arab sudah sejak sedari awal memiliki

sifat kewirausahaan, mencari kesempatan finansial dari sumber apapun.” (Carlen, 2016). Di bawah dinasti Umayyad dan Abbasid, umat Islam meraih banyak sekali keuntungan. Utamanya karena kekhalifahan saat itu dioperasionalkan layaknya perusahaan multinasional modern. Mayoritas kebijakan, termasuk di sini militer, didasarkan pada pertimbangan komersial. Dalam ekosistem seperti ini kewirausahaan menjadi *apparatus criticus*. Besarnya ukuran bidang ekonomi dunia Arab semakin menjadi dengan terjalannya kontak antara pedagang Arab dan wilayah asing seperti Yunani dan China. Melalui hubungan yang ciamik bersama Yunani, misalnya, para pelancong Arab sanggup membawa gumpalan pengetahuan baru yang sangat aplikatif dan menguntungkan bagi kehidupan (Winks, 1996). Dari China, peradaban Arab mendapatkan keahlian untuk membuat kertas. Kemampuan ini kemudian mereka manfaatkan dengan mendirikan pabrik pembuatan kertas. Karena produksinya, kertas yang berhasil diproduksi lalu disebarakan ke seluruh dunia Arab. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, adalah sejarah. Mengutip pernyataan Bernard Lewis (1992): “Dengan memfasilitasi dan mendorong korespondensi serta pencatatan, kertas membawa kecanggihan dan kompleksitas baru kepada urusan komersil, perbankan, dan birokrasi.”

Pendar kehebatan kewirausahaan peradaban Arab harus bertekuk lutut dihadapan hukum agama dan tradisi. Meskipun berhasil mencapai puncak kejayaan dengan segala kemajuan finansial yang didukung oleh ilmu pengetahuan, laju kencang lokomotif bangsa Arab terhenti karena adanya kontradiksi antara ekonomi dan agama. Semakin hebatnya struktur ekonomi membuat semua koloni harus mengikuti arus perubahan tersebut. Sayangnya, interpretasi rigid atas ketentuan agama mengantarkan kosmos kewirausahaan ke liang lahat. Masifnya limitasi membuat perambahan terhadap dunia ekonomi tidak memungkinkan.

Dari kemapanan peradaban Arab di abad kedelapan, potongan sejarah berlanjut ke abad kesembilan sampai empat belas China. Dalam bentang waktu ini China sukses menggantikan bangsa Arab sebagai negara adidaya. Kesuksesan itu mempunyai resep. Bagi China, apabila kita menekuni lembaran sejarahnya, formula tersebut adalah pasar bebas—bukan pasar bebas yang kita semua rasakan sekarang tentunya, tapi setidaknya ada kandungan kebebasan meskipun tidak total. Sejak Dinasti Tang (618-907) berkuasa, China membuang jauh paradigma operasional ekonomi *dirigisme*. Otoritas mengatur sedikit sekali urusan ekonomi. Sebaliknya, pasar pedesaan berkembang tanpa aturan ketat, wilayah kota ramai akan mobilitas manusia, perdagangan aksa dipermudah. Kebijakan bestari ini kemudian diteruskan secara berturut-turut oleh Dinasti Song (1227-1279), Mongol (1279-1368), Ming (1368-1644) dan menimbulkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya aspek organisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan (Chan, 2010). Pada masa Dinasti Ming, dunia kewirausahaan China semakin membara dengan keputusan pemberian keringanan pajak komersial. Hal ini sangat mendukung geliat wirausaha. Latar belakang struktural yang bagus tersebut mendorong agen, dalam hal ini masyarakat China, untuk menciptakan berbagai macam penemuan

vital seperti kertas, kompas, alat cetak. Tiga perkakas ini berperan penting dalam upaya ekstensifikasi pengaruh ekonomi China. Pertumbuhan signifikan yang sedang dirasakan oleh China pada saat itu tidak cukup membuat semua orang senang. Kepakan sayap ekonomi China runtuh seiring dengan dominasi Neo-Konfusianisme ekstrem Wang Yangming yang memusuhi ilmu pengetahuan secara membabi buta (Elvin, 1973).

Segera setelah China mengalami regresi, Eropa mulai menunjukkan taring. Manuver tersebut bukan sembarang hentakan, karena melalui pergerakan itu Eropa mampu mengatur percaturan sosial-ekonomi-politik dunia. Nama dari manuver itu adalah eksplorasi New World. Fase lindap bangsa Eropa berangsur membaik menjadi cahaya ketika Marco Polo selesai menulis catatan perjalanannya ke wilayah “Timur”. Pada saat itu narasi tentang “Timur” mendapat signifikansi buruk. Banyak orang menganggap bahwa dunia di luar sana sangat mengerikan. Karena diselimuti oleh aura jahat maka haram hukumnya melakukan perjalanan atau berhubungan langsung dengan “Timur”. Kepercayaan tradisional yang sangat simplistik ini cukup membuat penguasa Eropa gentar dan mengubur segala ambisi penaklukan. Sikap jago kandang ini berubah seiring perubahan gradasi wacana mengenai dunia “Timur”. Notasi Marco Polo yang menyebutkan bahwa daerah luar sana sebenarnya dipenuhi kekayaan alam mengubah derajat keberanian raja-raja Eropa. Perkembangan teknologi navigasi ikut menggugah nyali. Mereka yang sebelumnya takut langsung berani berkelakar soal rencana eksplorasi dunia baru. Motivasinya apalagi kalau bukan keuntungan. Raja pertama yang mengawali penjelajahan ini adalah Raja Portugal.

Tonggak kekuasaan maritim yang lama dipegang oleh Portugal dan Spanyol berlabuh ke tangan Belanda pada abad ke-18. Dua kongsi dagang awal pertama yang menyumbang porsi besar terhadap kejayaan Belanda ini adalah Dutch East Indie Company dan Dutch West Indie Company. Meskipun terbukti memberi banyak pundi-pundi, para konglomerat Belanda ternyata kurang puas dan memutuskan mendirikan kongsi dagang mayor, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (Schapira et al, 1996). Dibentuk dengan maksud ekspansi keuntungan pribadi pemiliknya, VOC cepat berkembang menjadi tumpuan ekonomi pemilik modal Belanda. Meroketnya skala perdagangan VOC tidak lepas dari pemberian berbagai hak istimewa (Carlen, 2016). Seperti jamak diketahui, VOC memiliki hak monopoli, kekuatan militer, serta membuat kesepakatan. Dengan rangkaian hak istimewa tersebut wajar apabila VOC cepat meraup keuntungan, khususnya di tanah penjajahan Belanda (Fryer & Jackson, 1998). Akan tetapi, seperti pepatah sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga, VOC pada akhirnya mengalami kebangkrutan akibat dosa internal pejabatnya. Korupsi, singkat kata, menghancurkan VOC. Estafet ini dilanjutkan oleh Inggris. Sama seperti kolega kolonialnya, Inggris berlayar demi mencari profit. Tahun 1600, British East India Company (BEIC) dirintis. Menurut cerita yang berkembang, pembangunan BEIC merupakan manifestasi dari kepentingan gabungan pengusaha Inggris untuk menjamah harta di Dunia Baru

sebanyak-banyaknya. Karsa itu berakhir suka ketika dalam perjalanan pertama saja, 237 pemegang saham BEIC meraup keuntungan sebesar dua kali lipat (Carlen, 2016).

Di saat Inggris mulai menenun jejaring ekonominya, bencana Black Death tiba-tiba datang. Ganasnya virus dan ketidaksiapan otoritas lokal menyulut api malapetaka. Keluarga kaya Inggris yang menggendong mayoritas ekonomi London pergi mencari suaka. Akibatnya, karena pelumas mesin ekonomi tidak ada, banyak pekerja menganggur. Masalah sosial ini merembet ke prahara lain berupa meningkatnya jumlah pengemis. Tergerak oleh pertunjukkan dekaden sedemikian parah, Thomas Firmin berinisiatif menciptakan medium yang menyediakan rakyat miskin penganggur dengan bahan mentah untuk melanjutkan pekerjaan biasa mereka (Owen, 1965). Ide Firmin terus merekah hingga pada tahun 1670 dia mampu mendirikan quasi-kewirausahaan sosial pertama. Menurut MacDonald dan Howorth (2018), usaha Firmin dapat disejajarkan bersama generasi kewirausahaan sosial kontemporer karena dia mendayagunakan mekanisme kewirausahaan guna mencapai tujuan sosial. Selain Firmin, Thomas Bray dan Thomas Gouge juga menyusuri jalan serupa. Bray, pendiri Society for Promotion of Christian Knowledge (SPCK), mengembangkan proposal perbaikan hidup "*lewd women*" melalui pemberian alternatif pekerjaan dan pelatihan. Sayang seribu sayang, meskipun sudah mengabsorpsi atribut kewirausahaan sosial, upaya trio Thomas tidak berjalan mulus; kebanyakan quasi-kewirausahaan sosial pada saat itu berusia pendek karena terlalu bergantung pada sumbangan satu atau dua individu mapan. Kegagalan itu mengindikasikan bahwa walaupun prototipe kewirausahaan sosial sudah muncul, penggabungan keduanya masih berbalut anomali.

Kemapanan maritim Inggris berlanjut ke fase Revolusi Industri. Setelah mengalami episode lindap yang penuh dengan pertumpahan darah, masyarakat Inggris lambat laun mencoba mengokestra rancangan tatanan ideal. Eksplosifitas ilmu pengetahuan yang semakin besar menjadi latar belakang rencana besar tersebut. Keberanian dan keberhasilan deretan ilmuwan seperti Evangelista Torricelli, Galilei Galileo, Isaac Newton mendemonstrasikan observasi empiris membuktikan superioritas sains. Mereka sukses membuka mata semua orang bahwa segalanya mungkin terjadi apabila ilmu pengetahuan diberikan ruang gerak. Derap langkah ini ditangkap dengan cermat oleh pemilik pabrik di Inggris. Ketika orang seperti Thomas Newcomen dan James Watt disinyalir bisa mengembangkan desain mesin uap, pemodal langsung menggandeng dua ilmuwan tersebut dalam sebuah kerja sama. Konglomerat mau menebus paten penemuan mesin uap serta membiayai semua ramifikasi selanjutnya demi mengejar efektifitas produksi. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat itu industri Inggris masih bergantung pada kayu bakar untuk menjalankan mesin. Di sisi lain, batu bara belum banyak ditambang karena alat pertambangan masih belum canggih.

Kebuntuan tersebut dipecahkan oleh penemuan mesin uap satu silinder milik Thomas Newcomen dan mesin uap dua silinder James Watt (Hill, 1989). Mesin uap Newcomen membantu

mengentaskan air ketika pekerja menggali batu bara, mengizinkan pengambilan batu bara berlangsung secara efektif. Dampaknya, volume produksi batu bara terus menggunung. Besarnya hasil pertambangan batu bara mendorong industri untuk mengadopsi cara baru produksi. Di sini, invensi James Watt terbukti sangat berguna. Watt mengkontekstualisasikan mesin uap pertambangan batu bara ke dalam industri rumahan. Dengan menambahkan satu silinder, Watt mampu mengameliiorasi mesin uap yang sebelumnya sering dipakai di domain tambang menjadi teknologi siap guna nun praktis digunakan oleh pekerja pabrik (Allen, 2009). Setelah Newcomen dan Watt, nama-nama beken lain seperti James Hargreaves, Richard Arkwright, Abraham Darby, Samuel Crompton menyusul pendahulunya dengan menciptakan teknologi baru. Mesin pemintal, modifikasi mesin uap untuk kereta dan kapal, alat pelebur batu bara adalah beberapa penemuan berharga (Allen, 2009). Rentetan penemuan tersebut menyulut ledakan besar kewirausahaan. Pergumulan antara ilmuwan dan insan industrial memperhebat bangunan kewirausahaan Inggris. Di sini, layaknya dua era sebelumnya, kewirausahaan ditujukan untuk mencari keuntungan. Jarang sekali ada aspek sosial di sini, semua berkompetisi mendulang emas tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan.

Jarang bukan berarti tidak ada sama sekali. Efek detrimental Revolusi Industri kenyataannya tetap mampu mengetuk pintu hati segelintir individu untuk menyerahkan hidupnya pada orang lain. The School for the Indigent Blind, misalnya, eksis di sebagian besar daratan Inggris menawarkan pendidikan dan pelatihan menenun, memintal, serta pemberian kesempatan bekerja bagi penerima manfaat yang memiliki kebutuhan khusus (MaDonald & Howorth, 2018). Organisasi quasi-kewirausahaan sosial ini bercokol di Liverpool, London, dan Norwich. Sekolah lain, Asylum for the Industrious Blind, dengan logika kewirausahaan sosial juga hidup di Edinburgh pada tahun 1793. Di bidang lain, Thomas Bernard dan William Wlberforce merancang the Society for Bettering the Condition and Increasing the Comforts of the Poor (SBCP) yang fokus mengurus pelatihan berkebun, pembuatan sepatu, pemisahan wol untuk kaum paria (Gillard, 2011). Kurang puas, SBCP melebarkan sayapnya dengan mengkreasi the Philanthropic Society; sebuah sekolah rehabilitasi untuk anak dari keluarga kriminal atau anak yang melakukan kejahatan. Mewedarnya beberapa quasi-kewirausahaan sosial di atas merupakan sinyalemen kuat keberadaan ide puspas kewirausahaan dan sosial. Akan tetapi, seteguh apapun deretan organisasi itu berusaha, ide yang menang tetap bukan milik mereka. Kewirausahaan berasaskan profit murni lebih menggoda ketimbang nun berlandaskan sosial. Oleh karena itu, akan sangat tepat dan tidak berlebihan jika kita menjuluki era ini sebagai masanya kewirausahaan tradisional.

Difusi teknologi tepat guna, ekosistem kondusif, serta langgengnya hubungan antara ilmuwan dan industri mengantarkan Inggris ke depan gerbang kesejahteraan. Tercatat, Gross Domestic Bruto (GDP) Inggris pada akhir abad 18 dan awal abad sembilan belas melebihi semua negara Eropa

(Mokyr, 1990). *Editio princeps* Revolusi Industri di Inggris menyemburkan berkah, tidak hanya bagi masyarakat Inggris *an sich*, tapi juga wilayah lainnya. Kecanggihan industri Inggris menarik perhatian negara Eropa lainnya untuk datang ke teritori Ratu Elizabeth mempelajari *modus operandi* penemuan terkini. Selain opsi tersebut, daerah dengan cadangan uang besar sering memilih mendatangkan ilmuwan penemu guna mengajari ahli mesin yang mereka punya agar dapat merancang mesin itu di tanah air. Aktivitas penyebaran teknologi ini mencapai titik kulminasinya setelah tahun 1860. Di Belgia, misalnya, telah bercokol sebanyak 100 mesin uap; Perancis memiliki 70 buah; Belanda, Russia, dan Jerman menginstal mesin uap bahkan sebelum tahun 1860 (Allen, 2009). Kemajuan paling fenomenal terjadi di Amerika Serikat. Tepat saat negara lainnya masih terpaku menggunakan mesin uap di lokus pertambangan dan industri, Amerika Serikat perlahan memberdayakan transportasi dengan komposisi seperti mesin uap. Transportasi itu adalah kereta api. Inggris sebenarnya juga mengembangkan kereta api, tapi Amerika Serikat melalui pendanaan masif serta semesta sosial-politik moncer mampu menyalip Inggris.

Memikirkan yang Tidak Mungkin: Kewirausahaan Sosial dan Keruntuhan Negara Kesejahteraan

Kewirausahaan sosial bangkit ketika sistem Negara Kesejahteraan mengalami destruksi hebat. Semenjak Perang Dunia II melanda Eropa, sistem ekonomi yang menjadi paradigma utama adalah Keynesianisme. Sebagai sebuah teori dan praktik ekonomi, Keynesianisme menghendaki adanya kompromi antara kapitalisme dan negara (Palley, 2004). Menurut John Maynard Keynes, agar bisa berjalan dengan konsisten, negara harus dilibatkan secara parsial untuk mengatur jalannya roda ekonomi. Dalam benak Keynes, kapitalisme yang mengandalkan mesin pasar bebas tidak mungkin beroperasi sendiri karena jika dibiarkan mengendalikan kendali ia akan merusak bangunan ekonomi (Keynes, 2012). Depresi Besar yang menyerang Amerika Serikat menjadi bukti empiris tesis Keynes. Merefleksikan kesuksesan penanganan Depresi Besar, Keynes lalu berpostulat bahwa negara mesti membantu pasar bebas, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara seperti pekerjaan dan berbagai jenis subsidi lainnya (Keynes, 2012). Dia yakin kalau rantai fundamental sudah terpenuhi, ekonomi akan pulih karena permintaan meningkat. Ini terjadi karena tingkat kekayaan warga negara meningkat sehingga bisa memberikan bahan bakar yang cukup untuk menyalakan mesin ekonomi. Paham Keynes ini kemudian menjadi cetak biru rencana rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II usai. Didanai oleh Amerika Serikat dengan Marshall Plan, pembangunan Eropa didominasi oleh ide pertumbuhan ekonomi yang menekankan kompromi (Schmelzer, 2016).

Di Inggris, misalnya, banyak suara bersahutan menuntut resureksi ide perlindungan sosial. Bergaungnya usulan ini mendapat resonansi besar dan berhasil ditangkap oleh birokrat yang saat itu didominasi oleh ilmuwan. Dua diantaranya adalah T.H. Marshall yang mempopulerkan paham

kewarganegaraan sosial dan William Beveridge dengan Laporan Beveridgenya (Beveridge, 1942; Marshall, 1992). Laporan Beveridge yang terbit pada tahun 1942 menjadi landasan berpikir penyelenggaraan sistem kesejahteraan universal. Meskipun sudah tereverberasi sejak 1942, impetus agar segera menerapkan asistensi sosial semakin besar setelah Perang Dunia II berakhir. Iklim paska perang sangat mendukung niat khalis tersebut. Salah satu sejarawan Inggris bahkan menulis: “seiring berjalannya waktu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menangkal rasa stress dan kedaruratan hidup tidak hanya bagi orang miskin tapi juga semua kelas masyarakat.” (Tittmus, 1976). Sifat bantuan yang menyeluruh merupakan terobosan baru, sebelumnya kebijakan sosial memang telah diselenggarakan tapi skalanya sangat terbatas.

Situasi pasca perang yang membuat warga negara tidak berdaya akhirnya memaksa pemerintah Inggris menetapkan rezim jejaring keamanan sosial universal (Kendall, 2009). Keamanan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, hampir semua lanskap kebutuhan dasar ekonomi masyarakat Inggris ditanggung oleh negara (Lowe, 1999). Secara rutin, pemerintah memberikan segala macam kemudahan bagi warga negara melalui pelayanan publik ciamik. Semua orang tidak perlu khawatir memikirkan masa depan. Semua sudah dijamin oleh negara. Anak muda diberikan bantuan dana sekolah, pekerja diberkahi dengan pemenuhan hak dasar, pensiunan menerima uang pensiun, hunian mudah dicari karena negara mengendalikan penjualannya, kesehatan begitu murah akibat dibentuknya National Health Service (NHS) (Lowe, 1999). Fasilitas mumpuni semacam ini membentuk sebuah kepastian hidup. Jika seorang lahir, dia akan sekolah, kemudian bekerja di satu perusahaan dalam jangka waktu lama, lalu pensiun menikmati hari tua berikut semua keindahan dunia. Pola linier-progresif seperti ini memberikan kenikmatan tiada tara bagi masyarakat Inggris. Tiga *leitmotif* dasar—universalisme, komprehensif, kecukupan—Laporan Beveridge, apabila kita mencermati kembali kiprah Negara Kesejahteraan di Inggris, bisa dibilang berjalan sempurna.

Kesempurnaan itu memudar begitu sekuensi kritis menimpa kontinen Amerika Utara dan Eropa Barat. Naiknya harga minyak pada pertengahan tahun 1970, protes tanpa ujung elemen masyarakat menuntut eliminasi kolonisasi *life-world*, serta stagflasi yang mengikuti setelahnya menipiskan cadangan keuangan negara (Habermas; 1973; Marcuse; 2007; Nozick, 1999). Alokasi fiskal yang tadinya melimpah tiba-tiba berkurang drastis. Menghadapi keadaan kritis banyak usulan bermunculan. Kali ini, bukan Keynesianisme yang menjadi obat, tapi neoliberalisme. Menurut proponennya, neoliberalisme merupakan obat mujarab yang bisa menyembuhkan penyakit Keynesianisme (Friedman, 1982). Meninggikan doktrin moneterisme, ekonom neoliberal percaya bahwa pemotongan subsidi negara dan pengalihannya ke sektor produktif lain adalah solusi praktis yang bisa mengeluarkan otoritas penganut Keynesianisme dari lubang jarum dekadensi (Horn & Nik-Khah, 2018). Preskripsi tersebut kemudian dieksekusi secara besar-besaran oleh dua negara

utama, Amerika Serikat dan Inggris.

Awalnya, pembredelan model kesejahteraan universal diarahkan untuk menciptakan sebuah peradaban baru yang bersandar pada kemandirian dan tanggung jawab. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, bau anyir neoliberal pelan-pelan mulai tercium. Pembongkaran “*big government*” bukanlah metronom yang mengantarkan umat manusia ke tingkat kesejahteraan masif tapi alat ultima dehumanisasi dan depolitisasi. Saat negara mulai menarik diri dari percaturan jaminan kesejahteraan sosial, masalah sosial bukannya menurun namun malah meroket. Sayangnya, ketika problematika sosial semakin menggunung, jaminan sosial universal yang dahulu menanungi warga negara dari patologi telah bubar. Berhadapan dengan kenyataan pahit seperti itu tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk mengambil peran dan menumpuk solusi (Kendall, 2009). Mereka lalu memikirkan mekanisme apa yang kiranya praktis dan kompatibel. Di tengah dilema itu, ide ekstrem menyambar kepala William Drayton. Dia berpikir menggabungkan mekanisme kewirausahaan dengan tujuan sosial. Idennya cukup sederhana: menggunakan *modus vivendi* kewirausahaan guna menyasar permasalahan sosial. Drayton sadar spesies barunya akan berujung kepada kelengkaraan apabila unsur kelembagaan tidak dibentuk (Sen, 2007). Maka dari itu, untuk mengakumulasi kewirausahaan sosial dia membentuk Ashoka Foundation. Usai memelopori Ashoka, Drayton kemudian berkeliling menjajakan ide barunya. Tak dinanya banyak pihak tertarik oleh proposal Ashoka. Dana segar mengalir deras ke kantong institusi pertama kewirausahaan sosial. Dengan gumpalan uang sebesar itu, Ashoka berusaha mengemulasi kewirausahaan sosial di seluruh dunia. Di wilayah Eropa Barat lain, percabangan kewirausahaan sosial juga menunjukkan taringnya. Terkenal oleh orde kesejahteraan Bismarckian, Italia faktanya ikut terjerat lingkaran setan kapitalisme. Berhadapan dengan krisis ekonomi, pemerintah mengganti model pasif di mana warga negara menerima bantuan cuma-cuma menjadi tipe aktif yang menuntut individu untuk melakukan pelatihan supaya bisa terintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja (Borzaga, 2009). Namun, tawaran pelatihan publik dari pemerintah ini nyatanya kurang dapat mengakomodasi semua angkatan kerja. Kekosongan ini selanjutnya ditangani oleh “*second labour market programme*” yang dijalankan oleh sektor ketiga (Borzaga et al, 2017). Mengandalkan bentuk kooperatif, asosiasi ini sangat diandalkan oleh pemerintah untuk membantu kesusahan mereka. Realitas ini tentunya bukan datang tiba-tiba, kolaborasi antara organisasi non-profit sudah berlangsung lama. Organisasi non-profit yang didukung oleh pemerintah sering dilibatkan dalam proyek pelayanan sosial (Salamon, 2004). Akan tetapi, meskipun sudah berpengalaman dalam proyek kolaborasi, gelombang kedua ini jelas berbeda dari yang sudah-sudah. Mengunggulkan partisipasi aktif warga negara *a la* neoliberal, model kooperatif coba direplikasi oleh Parlemen Italia menjadi satu program legal yang kelak menjadi embrio *social enterprise*; kewirausahaan sosial versi Eropa (Borzaga & Defourny, 2001). Di benua Eropa, khususnya di bagian barat, kewirausahaan sosial dikultivasi oleh negara dan diberikan

subsidi. Hal ini berbeda dari fenomena Amerika Serikat yang menumbuhkan tipe individualistik kewirausahaan sosial.

Berdirinya kewirausahaan, mengutip penjelasan panjang di atas, bertalian dengan berkurangnya asistensi negara. Pemotongan berbagai bentuk bantuan sosial nyatanya bukan hanya untuk menyembuhkan dislokasi ekonomi, tapi ditujukan untuk merancang paradigma dan relasi gres antara negara dan warga negara. Paradigma anyar tersebut adalah independensi dan tanggung jawab. Mencatut elaborasi prominem neoliberal, depedensi serta ketergantungan akut merupakan efek langsung dari Negara Kesejahteraan (Fairclough, 2000). Pemberian masif bantuan sosial dinilai akan memproduksi unit generasi pemalas yang hanya bisa menengadahkan tangan. Padahal apabila sedikit berusaha, mereka sejatinya dapat berusaha. Kecurigaan mendalam terhadap penerima asistensi ini pada taraf selanjutnya berperan besar dalam agenda peluruhan sistem kesejahteraan universal. Ketimbang memelihara pemalas, lebih baik membiakkan warga negara yang memiliki atribut kemandirian *a la* wirausaha (Walters, 1997).

Rezim neoliberal yakin meskipun masyarakat nir memiliki jaring pengaman sosial mereka akan tetap bisa bertahan dengan sifat kewirausahaan. Karsa ini diterjemahkan ke dalam pemotongan ramai-ramai kebijakan sosial. Pemangkasan itu mendaratkan relasi anyar antara negara dan warga negara (Mitchell, 1995). Negara yang dahulu menjadi tempat bersimpuh sekarang sudah menutup diri. Masyarakat yang urung masuk istana eksekutif guna mengadukan keluhan hidup akhirnya mesti memutar otak. Ruang kosong yang ditinggalkan negara lalu terpaksa diisi oleh masyarakat (Gaynor, 2011). Kewirausahaan sosial adalah salah satu dari sekian banyak rotasi percobaan yang berhasil menghasilkan hasil akhir. Dari sini kewirausahaan sosial jelas lahir dari dua sumber utama: meningkatnya permasalahan sosial dan penarikan diri negara dari gelanggang pertanggung jawaban sosial. Keruntuhan Negara Kesejahteraan dan proyek responsabilisasi neoliberal adalah konteks di mana kewirausahaan sosial muncul. Mengapa kewirausahaan sosial muncul? Karena kewirausahaan sosial mampu menyelesaikan masalah sosial dan sekaligus menghidupkan spirit kewirausahaan. \

Masa Institusionalisasi: Kewirausahaan Sosial, Pemerintah, dan Kepentingan Ideologis

Akselerasi kewirausahaan sosial berlanjut di era milenium. Masa-masa ini ditandai oleh pengakuan terhadap pluralisme kewirausahaan sosial. Law No. 118 tahun 2005 dan Dekrit Legislatif No. 155 tahun 2006, misalnya, mulai menyertakan social enterprise lain selain kooperatif sosial. Aturan ini, secara sederhana, mencoba memperlebar definisi kewirausahaan sosial. Terakhir, pada tahun 2016, usai melewati debat panjang, pemerintah Italia mengeluarkan Law No. 106 yang menetapkan kewirausahaan sosial ke dalam kategori sektor ketiga (Borzaga et al, 2017). Dari skala dukungan, Italia tampaknya menjadi rumah yang nyaman bagi kewirausahaan sosial. Akan tetapi, promosi dan praktik terbesar kewirausahaan sosial tidak berlangsung di negeri para gladiator. Upaya paling

fenomenal penggenjotan tenaga kewirausahaan sosial justru terjadi di Inggris.

Satu setengah dekade kepemimpinan Partai Konservatif Inggris menimbulkan dampak institusional dan budaya. Di ranah institusional, Partai Konservatif memperkenalkan praktik baru pelayanan publik. Bersandar pada logika pasar, operasional dijalankan menurut mekanisme perusahaan. Peringai korporasi yang penuh dengan perhitungan merangsek masuk mengubah wajah institusi publik (Grenier, 2009). Meskipun besar, pengaruh paling masif justru terejawantahkan pada dimensi kultural. Proyek penanaman budaya kewirausahaan Partai Konservatif mengalir menyetrum nadi terdalam, tidak hanya jaringan pemerintah, tapi seluruh warga negara (Hetzner, 1999; Keat & Abercrombie, 1991). Favoritisme rakyat Inggris kepada Partai Konservatif memaksa Partai Buruh merumuskan program baru. Minder melawan kedigdayaan neoliberalisme, Partai Buruh menawarkan proyek Jalan Tengah. Dipimpin oleh Tony Blair, mereka melakukan *rebranding* besar-besaran; nama diubah menjadi Partai Buruh Baru untuk membedakan diri dari gaya lama, paradigma mapan diganti secara total. Jika Partai Buruh lama terkenal karena keteguhannya dalam memegang panji sosial-demokrat, Partai Buruh Baru mencoba membuang imaji sosialisme dan menggantinya dengan percampuran antara misi sosialisme dan kapitalisme (Giddens, 1998). Bersama-sama, mereka memproklamirkan kematian distingsi *Left and Right* serta mengumumkan ketakterhindaran globalisasi (Giddens, 2007). Strategi politik baru ini ternyata manjur. Pada pemilihan umum 1997, Partai Buruh Baru memenangkan pertempuran politik. Sesuai janji mereka, Tony Blair mempraktikkan idenya soal Jalan Tengah. Salah satu manifestasi nyata ide tersebut adalah kewirausahaan sosial.

Bersamaan dengan pewartaan definisi pragmatis tersebut, kewirausahaan sosial akhirnya mencapai surga. Ia menyebrang dari wacana kebijakan menjadi implementasi konkret. Tahun 2006, Social Enterprise Unit dijejerkan bersama Active Communities Unit guna mengkerangkai badan baru bernama Office of the Third Sector di bawah kepemimpinan Cabinet Office di mana kewirausahaan sosial menjadi rujukan resmi sektor ketiga (Alcock, 2012; Carmel & Harlock, 2008). Usaha homogenisasi ini merupakan cara Partai Buruh Baru mempromosikan model “*earned income*” ke semua varietas organisasi non-profit. Ketika semua sektor ketiga menganut diktum kewirausahaan sosial diharapkan depedensi berkurang, dana publik dengan demikian bisa dihemat (Sepulvuda, 2009). Inilah kepentingan tersembunyi dari pengarusutamaan kewirausahaan sosial Partai Buruh Baru. Formasi kewirausahaan sosial Inggris ditutup oleh peresmian Public Services Act 2012 yang didaku sebagai langkah maju pengembangan kewirausahaan sosial (Cabinet Office, 2014). Unikinya, penguatan terakhir tadi diloloskan oleh rezim David Cameron. Seorang konservatif ulung, Cameron nyatanya tetap mempertahankan kewirausahaan sosial. Bersama jajarannya ia yakin kesaktian kewirausahaan sosial akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Persistensi kewirausahaan sosial ini tentu menimbulkan pertanyaan. Jauh dari anggapan pendamping pemerintah dalam

menyediakan pelayanan sosial, kewirausahaan sosial justru malah menggantikan peran dan tanggung jawab otoritas. Kewirausahaan sosial yang awalnya diamplifikasi sebagai jalan tengah antara monster sosialisme dan kebringasan neoliberalisme ternyata menjadi *apparatus criticus* kapitalisme untuk menyembunyikan falasi struktur.

Diseminasi Kewirausahaan Sosial: Gambaran Kontemporer

Tahun 2006, di dalam ruangan mewah dengan dekorasi modern, Ole Danbolt Mjos, Ketua Komite Nobel Norwegia, mengumumkan Muhammad Yunus dan Grameen Bank sebagai penerima hadiah nobel. Alasan pemberian ini, *prima facie*, dilatarbelakangi oleh “usaha mereka menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.” Bagi individu yang mendalami kewirausahaan sosial, Muhammad Yunus bukan orang asing. Sejak dia berhasil mendapat hadiah nobel, kewirausahaan sosial praktis menjadi agama baru (Yunus, 2008). Di seluruh penjuru dunia, kewirausahaan sosial selalu disebut dan disambut secara antusias. Pejabat, masyarakat sipil, presiden, semua golongan sosial menikmati kontribusi “nyata” kewirausahaan sosial. Imaji *bottom-up* yang melekat pada diri kewirausahaan sosial memperdaya banyak orang. Gelombang transmisi ini tentu tidak datang sendiri, ia adalah produk dari cetak biru kewirausahaan sosial global yang bertujuan mendiseminasikan wacana serta praktik *social entrepreneurship*.

Kewirausahaan sosial adalah *rising star* abad ini. Montase negara “maju” dan “berkembang” telah meratifikasi wacana dan praktik kewirausahaan sosial. Khusus untuk negara Selatan, mutasi kewirausahaan sosial berkaitan erat dengan promosi pembangunan berkelanjutan, penyelesaian problematika sosial, dan reintroduksi sistem kesejahteraan baru. Kumpulan program sudah diintrodusir berbagai negara Selatan. Banyak dari mereka bahkan memperbaharui undang-undang untuk memberi karpet merah bagi masuknya kewirausahaan sosial. Langkah legal tersebut merupakan barang bukti begitu dalamnya kesan yang ditimbulkan oleh kewirausahaan sosial. Lembaga non-profit internasional memegang peranan penting di sini. Mayoritas negara berkembang mendapat resonansi kewirausahaan sosial berkat keberadaan institusi ekspatriat seperti Ashoka Foundation, British Council, DBS Foundation, Goethe-Institut, UnLtd. Dengan varian cara nun berbeda, mereka mengimpor kewirausahaan sosial dari benua biru menuju negara tujuan. Dipoles menyesuaikan keadaan lokal, barang impor ini pelan-pelan diintegrasikan dengan agenda pembangunan yang menggenggam prinsip Sustainable Development Goals (berkelanjutan dan inklusif) dan pertumbuhan ekonomi (Amin, 2009; Borzaga & Defourny, 2001). Nafsu ekonomi diusahakan terus berkelindan meskipun ia harus menggandeng cara halus (British Council, 2020). Tetapi, walaupun di awal mengenakan jubah manusiawi, gaya pembangunan kewirausahaan sosial, *in the last instance*, tetap mengejar hasrat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan ultima (British Council, 2018). Faktor keberlanjutan dan inklusifitas, oleh karenanya, hanyalah topeng dari satu kepentingan tersembunyi: meneruskan tradisi *trickle-down effect*.

Dicermati dari arus difusinya, kewirausahaan sosial yang meresap di Indonesia dan negara Selatan lainnya merupakan derivasi langsung dari praktik di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Wacana serta praktiknya merefleksikan bagaimana kewirausahaan sosial dilangsungkan di “Barat”. Apakah ia dalam prosesnya mewarisi kecenderungan individualistik Amerika Serikat atau komunitarian Eropa perlu dipertajam lagi lewat penelitian lainnya. Studi ini membatasi pada dua temuan: (a) mayoritas kewirausahaan sosial adalah barang impor dan (b) kewirausahaan sosial diposisikan sebagai benteng pertahanan *raison d’etre* paradigma pertumbuhan ekonomi melalui citra berkelanjutan dan inklusif.

SIMPULAN

Dari penelusuran ekstensif genealogi kewirausahaan sosial diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Kewirausahaan sosial merepresentasikan palingan sosial (*social turn*) dalam semesta kewirausahaan. Sejak masa Mesopotamia sampai era Internet, kewirausahaan hampir selalu didekati dari sudut pandang keuntungan dan profit. Semua ini berubah saat Negara Kesejahteraan runtuh. Penarikan diri negara dari bentala jaring pengaman sosial serta kenaikan eksponensial permasalahan sosial mengizinkan penggabungan kewirausahaan dan sosial. Di Amerika Serikat, bibit itu mewujud dalam semangat individualistik *social entrepreneur a la* William Drayton dan Ashoka Foundation. Di Eropa Barat, khususnya Italia dan Inggris, kewirausahaan sosial berkembang melalui model *social enterprise* (kooperatif sosial). Dua episentrum kewirausahaan sosial tersebut memiliki corak pergerakan berbeda; jika *social entrepreneur* mengandalkan kemampuan individu *par excellence*, *social enterprise* menggamit spirit komunitas.
2. Kendati berbeda dalam hal intensi, kewirausahaan konvensional dan kewirausahaan sosial mendayagunakan subjek serupa. *Homo economicus* dengan atribut kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, peka terhadap kesempatan sama-sama dikultivasi oleh keduanya. Bedanya, kewirausahaan sosial merawat *homo economicus* demi meraup dampak sosial, kewirausahaan konvensional melestarikan *homo economicus* untuk menggandakan kekayaan pribadi.
3. Kewirausahaan sosial mulai mengudara pada tahun 1980. Latar belakangnya adalah resesi ekonomi yang terjadi dari pertengahan hingga akhir dekade 70 yang membuat negara memenggal sebagian besar porsi bantuan sosial. Di sisi lain, rezim neoliberal yang baru saja menguasai politik dan memperkenalkan entri fleksibilitas justru memproduksi masalah sosial baru. Terjepit oleh dua keadaan kompleks tersebut, masyarakat akhirnya terpaksa merancang solusi baru, salah satunya kewirausahaan sosial. Walaupun bersumber dari momen keterpaksaan, banyak akademis masih memuja kewirausahaan sosial sebagai inisiatif kesukarelawanan *tout court*. Kenyataannya, ia merupakan hasil dari masa-masa kritis Darwinisme Sosial. Kewirausahaan sosial muncul sebagai respon atas kegagalan negara dan pasar menghadirkan kerangka sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif bukan karena masyarakat sipil ingin membantu pemerintah. Pada fase selanjutnya, karena kontribusi masifnya terhadap kastrasi permasalahan sosial dan pertumbuhan ekonomi,

kewirausahaan sosial mengalami penguatan institusional. Kewirausahaan sosial lambat laun dimasukkan ke dalam skema baru program kesejahteraan sosial otoritas

DAFTAR PUSTAKA

- Alcock, P. (2012). New Policy Spaces: The Impact of Devolution on Third Sector Policy in the UK. *Social Policy & Administration*, 219-238.
- Allen, R. C. (2009). *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Amin, A. (2009). Extraordinarily Ordinary: Working in the Social Economy. *Social Enterprise Journal*, 30-49.
- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? *Entrepreneurship Theory and Practice*, 1-22.
- AVPN, Council, B., & UNESCAP. (2020). *Creative and Social Enterprise in Indonesia*. Jakarta: British Council.
- Blair, Tony. & Schroeder, G. (1998). *Europe: The Third Way/Die Neue Mitte*. Johannesburg: Friedrich Ebert Foundation, 1-12.
- Bloom, G. M. (2006). The Social Entrepreneurship Collaboratory (SE Lab): A University Incubator for a Rising Generation of Social Entrepreneurs. In A. Nicholls, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change* (pp. 270-306). New York: Oxford University Press.
- Boddice, R. (2009). Forgotten Antecedents: Entrepreneurship, Ideology and History. In R. Ziegler, *An Introduction to Social Entrepreneurship: Voices, Preconditions, Contexts* (pp. 133-155). Cheltenham: Edward Elgar.
- Borzaga, C., & Defourny, J. (2001). *The Emergence of Social Enterprise*. London: Routledge.
- Borzaga, C., Poledrini, S., & Galera, G. (2017). Social Enterprise in Italy: Typology, Diffusion and Characteristics. *European Working Papers*, 1-27.
- Cain, L. P. (2010). Entrepreneurship in the Antebellum United States. In D. P. Landes, J. Mokyr, & W. J. Baumol, *The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times* (pp. 331-366). Princeton: Princeton University Press.
- Carlen, J. (2016). *A Brief History of Entrepreneurship: The Pioneers, Profiteers, and Racketeers Who Shaped Our World*. New York: Columbia University Press.
- Carmel, E., & Harlock, J. (2008). Instituting the 'Third Sector' as a Governable Terrain: *Partnership, Procurement and Performance in the UK*. *Policy & Politics*, 155-171.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. UK: Wiley-Blackwell.
- Catherall, R., & Richardson, M. (2020). *Social Entrepreneurship: Empowering the Next Generation to Address Society's Needs*. London: British Council.
- Chan, W. K. (2010). Chinese Entrepreneurship since its Late Imperial Period. In D. S. Landes, S. Mokyr, & W. J. Baumol, *The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Mesopotamia to Modern Times* (pp. 469-500). Princeton: Princeton University Press.
- Charlotte Choyte, G. W. (2012). *Universities Enabling Social Enterprise*. England: Universities UK.
- Cho, A. H. (2006). Politics, Values and Social Entrepreneurship: A Critical Appraisal. In J. Mair, J. Robinson, & K. Hockets, *Social Entrepreneurship* (pp. 34-56). New York: Palgrave Macmillan.
- Cook, B., Dodds, C., & Mitchell, W. (2003). Social Entrepreneurship: False Promises and Dangerous

- Forebodings. *Australian Journal of Social Issues*, 57-72.
- Council, B., & ESCAP. (2018). *Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia*. Jakarta: British Council.
- David Bornstein, S. D. (2010). *Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press.
- Dees, G. (1998). The Meaning of Social Entrepreneurship. 1-6.
- Dees, G. (2004). Social Entrepreneurship is About Innovation and Impact, Not Income. *CASE Connection*, 1-4.
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2008). *Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments*. Belgium: EMES.
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. *Journal of Social Entrepreneurship*, 32-53.
- Drayton, B. (2004). *Leading Social Entrepreneurs Changing the World (Activist Biographies)*. United States: Ashoka Innovators for the Public.
- Drayton, B. (2006). The Citizen Sector Transformed. In A. Nicholls, *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Change* (pp. 45-55). New York: Oxford University Press.
- Elvin, M. (1973). *The Pattern of the Chinese Part: A Social and Economic Interpretation*. Stanford: Stanford University Press.
- Fairclough, N. (2000). *New Labour, New Language*. New York: Routledge.
- Forum, W. E. (2020). *Schwab Foundation for Social Entrepreneurship: Two Decades of Impact*. Geneva: World Economic Forum.
- Foucault, M. (1972). *Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1984). *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- Foundation, A. (2018). *Leading Social Entrepreneurs*. USA: Ashoka Foundation.
- Friedman, M. (1982). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fryer, D. W., & Jackson, J.C. (1998). Indonesia. London: Benn/Westview.
- Garland, D. (2014). What is a "History of the Present"? On Foucault's Genealogies and Their Critical Preconditions. *Punishment & Society*, 365-384.
- Gaynor, N. (2011). In-Active Citizenship and the Depoliticization of Community Development in Ireland. *Community Development Journal*, 27-41.
- Gibbon, E. (1995). *The Decline and Fall of the Roman Empire*. New York: HarperCollins.
- Giddens, A. (1998). *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (2007). *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Grenier, P. (2009). Social Entrepreneurship in the UK: From Rhetoric to Reality. In R. Zigler, *An Introduction to Social Entrepreneurship* (pp. 174-206). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Hawks, J. (1973). *The First Great Civilizations*. New York: Knopf.
- Hebert, R. F., & Link, A. N. (2009). *A History of Entrepreneurship*. New York: Routledge.
- Hetzner, C. (1999). *The Unfinished Business of Thatcherism: The Value of the Enterprise*. New York: Peter Lang.

- Hill, C. (1989). *Power from Steam: A History of Stationary Steam Engine*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hood, C. (1991). A Public Management For All Seasons? *Public Administration*, 3-19.
- Horn, R. V., & Nik-Khah, E. (2018). Planning the 'Free' Market: The Genesis and Rise of *Chicago* Neoliberalism. In D. Cahill, M. Cooper, M. Konings, & D. Primrose, *the SAGE Handbook of Neoliberalism* (pp. 98-112). London: SAGE Publications.
- Idris, A., & Hati, R. H. (2013). Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship*, 277-301.
- Industry, D. o. (2002). *Social Enterprise: A Strategy for Success*. London: DTI.
- Keat, R., & Abercrombie, N. (1991). *Enterprise Culture*. New York: Routledge.
- Kerlin, J. (2006). Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from Differences. *Voluntas*, 246-262.
- Keynes, J. M. (2013). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kramer, S. (1978). *Cradle of Civilization*. New York: Time-Life.
- Krieger, J. (1987). Social Policy in the Age of Reagan and Thatcher. *The Social Register*, 177-198.
- Lamoreaux, N. R. (2010). Entrepreneurship in the United States, 1865-1920. In D. S. Landes, J. Mokyr, & W. J. Baumol, *the Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times* (pp. 367-400). Princeton: Princeton University Press.
- Leadbeater, C. (1997). *The Rise of the Social Enterprise*. London: Demos.
- Lewis, B. (1992). *Race and Slavery in the Middle East*. Oxford: Oxford University Press.
- Lowe, R. (1999). *The Welfare State in Britain since 1945*. London: Macmillan Press.
- Maddison, A. (2002). *The World Economy: A Millennial Perspective*. Paris.
- Marcuse, H. (2007). *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. New York: Routledge.
- Marshall, T., & Bottomore, T. (1992). *Citizenship and Social Class*. London: Pluto Press.
- Martin, R. L., & Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. *Stanford Social Innovation Review*, 29-39.
- Massa, A. (1977). *The Phoenicians*. Geneva: Minerva.
- Mason, C. (2012). A Critical Discourse Analysis of Social Entrepreneurship Discourse in the *United Kingdom*. *Social Enterprise Journal*, 123-140.
- Mitchell, D. (1995). Governing the Unemployed Self in an Active Society. *International Journal of Human Resource Management*, 559-583.
- Mokyr, J. (1990). *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurshafira, T., & Alvian, R. A. (2018). Political-Economy of Social Entrepreneurship in *Indonesia: A Polanyian Approach*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 144-157.
- Office, C. (The Public Services (Social Act) 2012: One Year On). *2014*. London: Cabinet Office.
- O'Rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2009). Did Vasco da Gama Matter for European Markets? *Economic History Review*, 655-684.